



Original Article

Efektivitas Forum Kemitraan Polisi dan Organisasi Masyarakat dalam Pencegahan Konflik Politik di Kota Bandar Lampung

Sigit Riyadi^{1✉}, Budhi Waskito², Riswan³

^{1,2,3}Jurusan Ilmu Administrasi, Universitas Bandar Lampung, Indonesia

Korespondensi Email: riyadisigit101@gmail.com[✉]

Abstrak:

Meningkatnya dinamika politik lokal di Indonesia, khususnya pada momentum elektoral, berimplikasi pada tingginya potensi konflik politik yang dapat mengganggu stabilitas keamanan dan kualitas demokrasi lokal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas Forum Kemitraan Polisi dan Organisasi Masyarakat (FKPM) dalam pencegahan konflik politik di Kota Bandar Lampung, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi kinerjanya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode eksploratif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi, dengan informan yang ditentukan secara purposive meliputi unsur kepolisian, organisasi masyarakat, tokoh masyarakat, serta Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kota Bandar Lampung. Analisis data dilakukan menggunakan model interaktif Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa FKPM telah berperan sebagai wadah komunikasi dan koordinasi antara kepolisian dan organisasi masyarakat, namun efektivitasnya belum optimal karena masih bersifat formalistik dan administratif. Faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas FKPM meliputi rendahnya partisipasi komunitas yang substantif, lemahnya kepercayaan dan legitimasi publik, keterbatasan komunikasi dan adaptasi terhadap dinamika politik digital, belum optimalnya koordinasi interinstitusional, keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, serta mekanisme respon cepat yang masih reaktif. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan rekonstruksi FKPM menuju model kemitraan yang bersifat *community-based* dan deliberatif, dengan menempatkan kepolisian sebagai fasilitator yang netral dan memperkuat tata kelola keamanan kolaboratif guna mewujudkan stabilitas politik dan demokrasi lokal yang berkelanjutan di Kota Bandar Lampung.

Kata kunci: community policing, FKPM, kemitraan polisi dan masyarakat, konflik politik, stabilitas politik lokal.

Submitted	: 30 January 2026
Revised	: 6 February 2026
Acceptance	: 14 February 2026
Publish Online	: 15 February 2026

Pendahuluan

Dinamika politik lokal di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan kecenderungan meningkatnya potensi konflik, terutama menjelang dan selama pelaksanaan pemilihan kepala daerah, pemilihan legislatif, serta berbagai aktivitas politik lainnya ([Soekanto, 2018; Suryono, 2020](#)). Konflik politik di tingkat lokal umumnya dipicu oleh persaingan antar-elite, mobilisasi massa yang tidak terkendali, polarisasi identitas, penyebaran informasi yang tidak akurat, serta lemahnya kanal partisipasi antara pemerintah, aparat keamanan, dan masyarakat ([Agustino, 2020; Van Meter & Van Horn, 2019](#)). Apabila potensi tersebut tidak dikelola secara efektif, konflik politik dapat berkembang menjadi konflik terbuka yang mengganggu stabilitas keamanan, ketertiban masyarakat, dan kualitas demokrasi lokal ([Wirawan, 2015](#)).

Sebagai upaya mengantisipasi potensi konflik tersebut, Kepolisian Negara Republik Indonesia mengembangkan pendekatan *community policing* yang menekankan kemitraan antara polisi dan masyarakat ([Skogan, 2016; Trojanowicz & Bucqueroux, 2019](#)). Salah satu bentuk implementasinya adalah pembentukan Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat (FKPM), yang berfungsi sebagai wadah partisipasi komunitas, dialog, dan kolaborasi multipihak dalam menjaga keamanan serta mencegah konflik sosial, termasuk konflik bernuansa politik ([Goldstein, 2019; Rosenbaum, 2017](#)). FKPM melibatkan unsur kepolisian, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, serta organisasi kemasyarakatan (ormas) sebagai mitra strategis dalam menciptakan situasi keamanan yang kondusif ([Putra, 2024](#)).

Di Kota Bandar Lampung, keberadaan FKPM menjadi semakin penting mengingat karakteristik sosial masyarakat yang heterogen, tingginya intensitas kegiatan politik, serta kompleksitas persoalan perkotaan yang berpotensi memicu ketegangan sosial ([Soekanto, 2018; Suryono, 2020](#)). Melalui mekanisme mediasi sosial, deteksi dini konflik, penyaluran aspirasi masyarakat, dan sosialisasi ketertiban politik, FKPM diharapkan mampu berperan sebagai instrumen pencegahan konflik sekaligus *early warning system* terhadap potensi konflik politik ([Bromley & Mackenzie, 2019](#)). Kedekatan ormas dan tokoh masyarakat dengan basis sosialnya menjadikan FKPM memiliki posisi strategis dalam menyerap gejala awal ketegangan di tingkat akar rumput sebelum berkembang menjadi konflik yang lebih luas ([Rosenbaum, 2017](#)).

Namun demikian, efektivitas FKPM dalam menjalankan perannya masih menghadapi berbagai tantangan. Berdasarkan data Kesbangpol Kota Bandar Lampung tahun 2025, teridentifikasi sejumlah permasalahan dalam pelaksanaan forum kemitraan, antara lain lemahnya koordinasi antaraktor, ketidaksinkronan data potensi konflik, rendahnya partisipasi sebagian ormas, keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, minimnya dukungan teknologi informasi, perbedaan kepentingan antarormas, serta menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap forum ([Badan Kesbangpol Kota Bandar Lampung, 2022](#)). Permasalahan tersebut berdampak langsung pada belum optimalnya fungsi deteksi dini dan respons cepat terhadap potensi konflik politik di tingkat komunitas ([Setiawan, 2021](#)).

Selain tantangan internal kelembagaan, perkembangan teknologi informasi turut menambah kompleksitas dinamika politik lokal. Penyebaran hoaks, ujaran kebencian, dan provokasi politik melalui media sosial berlangsung sangat cepat dan seringkali melampaui kemampuan FKPM dalam melakukan klarifikasi dan mediasi secara konvensional ([Agustino, 2020; Skogan, 2016](#)). Keterbatasan literasi digital dan belum adanya sistem pelaporan serta pemantauan berbasis teknologi menyebabkan potensi konflik politik yang muncul di ruang digital sulit diidentifikasi sejak dini ([Bromley &](#)

[Mackenzie, 2019](#)).

Temuan empiris menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2025 terdapat 58 kasus permasalahan yang berkaitan dengan upaya pencegahan konflik politik melalui Forum Kemitraan antara Kepolisian dan Organisasi Masyarakat di Kota Bandar Lampung. Permasalahan tersebut mencakup aspek kelembagaan, komunikasi politik, partisipasi ormas, kapasitas sumber daya manusia, kepercayaan publik, regulasi dan SOP, serta respons penanganan konflik ([Badan Kesbangpol Kota Bandar Lampung, 2022](#)). Kondisi ini mengindikasikan bahwa potensi konflik politik tidak hanya dipengaruhi oleh dinamika politik elektoral, tetapi juga oleh kualitas kemitraan, koordinasi, dan kapasitas aktor-aktor yang terlibat dalam sistem pencegahan konflik ([Campbell, 2019](#); [Steers, 2019](#)).

Dalam perspektif teori *community policing*, keberhasilan pencegahan konflik sangat ditentukan oleh keterlibatan aktif masyarakat, kepercayaan antara polisi dan warga, serta kualitas hubungan antaraktor dalam forum kemitraan ([Skogan, 2016](#); [Trojanowicz & Bucqueroux, 2019](#)). Oleh karena itu, efektivitas FKPM tidak hanya diukur dari keberadaan struktur formal, tetapi juga dari sejauh mana forum tersebut mampu menjalankan fungsi deteksi dini, mediasi, dan koordinasi secara responsif dan berkelanjutan ([Cameron & Whetten, 2019](#)).

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian mengenai efektivitas Forum Kemitraan Polisi dan Organisasi Masyarakat dalam pencegahan konflik politik di Kota Bandar Lampung menjadi penting dan mendesak. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran empiris mengenai kinerja FKPM, mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi efektivitasnya, serta merumuskan model kemitraan polisi–masyarakat yang lebih inklusif, adaptif, dan berkelanjutan dalam menjaga stabilitas politik lokal ([Putra, 2024](#); [Quinn & Rohrbaugh, 2019](#)).

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode eksploratif untuk memahami secara mendalam efektivitas Forum Kemitraan Polisi dan Organisasi Masyarakat (FKPM) dalam pencegahan konflik politik di Kota Bandar Lampung ([Moleong, 2017](#); [Sugiyono, 2019](#)). Pendekatan kualitatif dipilih karena upaya pencegahan konflik politik tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis keamanan, tetapi juga melibatkan proses sosial, relasi antaraktor, pola partisipasi komunitas, serta interpretasi subjektif para pelaku terhadap dinamika politik lokal ([Denhardt, 2011](#); [Parsons, 2019](#)).

Metode eksploratif digunakan karena penelitian ini bertujuan untuk menggali fenomena kemitraan antara kepolisian dan organisasi masyarakat yang belum memiliki model baku dan terstruktur secara kontekstual di Kota Bandar Lampung ([Arikunto, 2019](#)). Pendekatan ini memungkinkan peneliti menelusuri praktik, pola interaksi, serta dinamika hubungan antaraktor dalam FKPM, sekaligus mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas forum dalam pencegahan konflik politik ([Duncan, 2019](#)).

Fokus penelitian diarahkan pada tiga aspek utama, yaitu efektivitas FKPM, faktor-faktor yang memengaruhi efektivitasnya, serta model kemitraan ideal yang kontekstual ([Campbell, 2019](#); [Cameron, 2019](#)). Informan penelitian ditentukan secara purposive sampling, melibatkan kepolisian, tokoh masyarakat, ormas, serta Bakesbangpol Kota Bandar Lampung ([Arikunto, 2019](#)).

Penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi, sedangkan data sekunder

diperoleh dari arsip FKPM, regulasi, laporan pemerintah daerah, dan penelitian terdahulu ([Sugiyono, 2019](#)).

Analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi ([Moleong, 2017](#)). Keabsahan data dijamin melalui triangulasi sumber dan teknik, *member check*, serta diskusi sejawat ([Sugiyono, 2019](#)).

Hasil

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kota Bandar Lampung memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas politik dan ketertiban umum melalui fungsi koordinasi, fasilitasi, serta deteksi dini potensi konflik politik. Sebagai perangkat daerah yang menangani urusan kesatuan bangsa dan politik, Bakesbangpol berkontribusi dalam penguatan wawasan kebangsaan, pendidikan politik masyarakat, pembinaan organisasi kemasyarakatan, serta pencegahan konflik sosial. Peran ini menjadikan Bakesbangpol sebagai aktor kunci dalam mendukung keberlangsungan Forum Kemitraan Polisi dan Organisasi Masyarakat (FKPM), khususnya dalam memperkuat sinergi antara kepolisian, pemerintah daerah, dan elemen masyarakat. Namun demikian, efektivitas peran tersebut masih sangat bergantung pada kualitas koordinasi lintas lembaga dan keterlibatan aktif organisasi masyarakat dalam setiap proses pencegahan konflik politik.

Temuan penelitian memperlihatkan bahwa efektivitas FKPM dalam pencegahan konflik politik di Kota Bandar Lampung belum sepenuhnya optimal. FKPM telah berfungsi sebagai wadah komunikasi dan koordinasi antara kepolisian dan organisasi masyarakat, terutama dalam menjaga stabilitas keamanan pada momentum politik tertentu seperti pemilu dan pilkada. Akan tetapi, forum ini masih cenderung berjalan secara formalistik dan administratif, sehingga belum sepenuhnya mampu berfungsi sebagai instrumen pencegahan konflik yang bersifat preventif dan berkelanjutan. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberadaan forum secara struktural belum otomatis menjamin efektivitas fungsionalnya di tingkat praktik.

Partisipasi komunitas dalam FKPM menjadi salah satu faktor penting yang memengaruhi efektivitas forum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan organisasi masyarakat dan tokoh lokal cukup membantu dalam proses deteksi dini potensi konflik politik. Namun, partisipasi tersebut masih terbatas pada kelompok-kelompok tertentu dan belum menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Intensitas pertemuan yang tidak rutin, keterbatasan arus informasi hingga ke tingkat akar rumput, serta minimnya pemanfaatan media komunikasi modern menyebabkan partisipasi masyarakat cenderung bersifat pasif dan elitis. Dalam perspektif *community policing*, kondisi ini menunjukkan belum terbangunnya partisipasi komunitas yang substantif, di mana masyarakat seharusnya berperan aktif sebagai subjek dalam menjaga stabilitas politik, bukan sekadar sebagai objek kebijakan keamanan.

Dimensi kepercayaan dan legitimasi juga menjadi temuan penting dalam penelitian ini. Hubungan antara kepolisian dan organisasi masyarakat secara formal telah terjalin, namun tingkat kepercayaan publik terhadap FKPM masih belum kuat. Sebagian masyarakat memandang FKPM sebagai perpanjangan tangan aparat keamanan, bukan sebagai forum dialog yang netral dan representatif. Kurangnya ruang dialog yang setara serta dominasi aparat dalam proses pengambilan keputusan berpotensi melemahkan legitimasi forum di mata masyarakat. Padahal, dalam teori

kemitraan dan collaborative governance, kepercayaan merupakan prasyarat utama bagi keberhasilan kerja sama lintas aktor dalam mengelola konflik dan menjaga stabilitas sosial.

Aspek komunikasi dan informasi menunjukkan bahwa FKPM memiliki potensi sebagai saluran strategis dalam pertukaran informasi dan klarifikasi isu-isu politik yang berkembang di masyarakat. Namun, efektivitas komunikasi dua arah dalam forum ini masih terkendala oleh lemahnya mekanisme komunikasi yang terstruktur dan keterbatasan pemanfaatan teknologi informasi. Di tengah pesatnya arus informasi dan penyebaran hoaks melalui media sosial, FKPM belum sepenuhnya adaptif dalam merespons dinamika politik digital. Hal ini menyebabkan forum sering kali bersifat reaktif, baru bergerak setelah konflik atau ketegangan muncul ke permukaan, sehingga fungsi pencegahan konflik belum berjalan secara optimal.

Koordinasi interinstitusional antara kepolisian, Bakesbangpol, dan organisasi masyarakat dalam kerangka FKPM dinilai cukup membantu dalam menyamakan persepsi dan pembagian peran dalam pencegahan konflik politik. Namun, koordinasi tersebut belum didukung oleh mekanisme kerja yang baku, berkelanjutan, dan terintegrasi. Kurangnya tindak lanjut yang sistematis serta belum adanya standar operasional prosedur yang jelas menyebabkan kerja sama antar lembaga masih bersifat situasional. Dalam konteks administrasi publik, kondisi ini mencerminkan lemahnya tata kelola kolaboratif yang seharusnya mampu mengintegrasikan peran berbagai aktor secara efektif dan berkesinambungan.

Kapasitas sumber daya manusia dalam FKPM juga menjadi faktor penentu efektivitas forum. Penelitian ini menemukan adanya perbedaan latar belakang pendidikan, pengalaman, dan pemahaman anggota forum terkait deteksi dini, analisis konflik, serta mediasi konflik politik. Keterbatasan pelatihan dan pendidikan publik yang berkelanjutan menyebabkan kemampuan anggota FKPM dalam mengelola konflik belum merata. Padahal, peningkatan kapasitas merupakan elemen penting dalam memperkuat peran forum sebagai instrumen pencegahan konflik yang berbasis pengetahuan dan keterampilan, bukan sekadar pengalaman praktis.

Mekanisme respon cepat FKPM telah memberikan kontribusi dalam meredam konflik politik skala kecil dan menjaga stabilitas keamanan secara situasional. Namun, mekanisme ini masih bersifat reaktif dan belum didukung oleh sistem monitoring dan evaluasi yang berkelanjutan. Ketidadaan sistem pelaporan berbasis komunitas yang terintegrasi membuat FKPM belum berfungsi optimal sebagai early warning system. Dalam perspektif manajemen konflik, respon yang bersifat reaktif cenderung hanya menghasilkan stabilitas semu, tanpa menyentuh akar permasalahan konflik yang bersifat laten dan struktural.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas Forum Kemitraan Polisi dan Organisasi Masyarakat dalam pencegahan konflik politik di Kota Bandar Lampung tidak hanya ditentukan oleh keberadaan forum secara formal, tetapi sangat bergantung pada kualitas partisipasi komunitas, tingkat kepercayaan dan legitimasi, efektivitas komunikasi dan koordinasi, kapasitas sumber daya manusia, serta mekanisme respon cepat yang berkelanjutan. Model FKPM yang saat ini diterapkan masih berorientasi administratif dan reaktif, sehingga cenderung menghasilkan stabilitas semu. Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi FKPM menuju model yang bersifat community-based dan deliberatif, dengan menempatkan kepolisian sebagai fasilitator yang netral, memperluas representasi aktor, serta mengedepankan pendekatan preventif dan prediktif. Penguatan FKPM sebagai instrumen tata kelola

keamanan kolaboratif menjadi langkah strategis untuk menekan eskalasi konflik politik, meningkatkan kepercayaan publik, membangun modal sosial lintas kelompok politik, serta memperkuat kualitas demokrasi lokal secara berkelanjutan di Kota Bandar Lampung.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa efektivitas Forum Kemitraan Polisi dan Organisasi Masyarakat (FKPM) dalam pencegahan konflik politik di Kota Bandar Lampung belum sepenuhnya optimal karena masih dihadapkan pada berbagai keterbatasan, seperti rendahnya partisipasi komunitas yang substantif, lemahnya kepercayaan dan legitimasi publik, keterbatasan komunikasi dan adaptasi terhadap dinamika politik digital, serta belum meratanya kapasitas sumber daya manusia dan mekanisme respon cepat yang berkelanjutan, meskipun Bakesbangpol Kota Bandar Lampung telah menjalankan peran strategis dalam koordinasi dan deteksi dini konflik politik. Oleh karena itu, penguatan dan transformasi FKPM menuju model kemitraan yang bersifat *community-based* dan deliberatif menjadi kebutuhan strategis dengan menempatkan masyarakat sebagai subjek utama pencegahan konflik, kepolisian sebagai fasilitator yang netral, serta didukung oleh peningkatan kapasitas aktor forum, penguatan komunikasi dua arah, sistem deteksi dini berbasis komunitas dan teknologi, serta koordinasi lintas lembaga yang berkelanjutan, sehingga FKPM dapat berfungsi secara optimal sebagai instrumen tata kelola keamanan kolaboratif dalam menjaga stabilitas politik dan memperkuat kualitas demokrasi lokal di Kota Bandar Lampung.

Daftar Pustaka

- Agustino, L. (2020). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Arikunto, S. (2019). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Badan Kesbangpol Kota Bandar Lampung. (2022). *Laporan Tahunan Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan*. Bandar Lampung.
- Bromley, M., & Mackenzie, S. (2019). *Preventing Communal Violence: Community Policing Strategies and Local Ownership*. Washington, DC: Georgetown University Press.
- Campbell, J. P. (2019). *On the Nature of Organizational Effectiveness*. San Francisco: Jossey-Bass.
- Cameron, K. S. (2019). *Critical Questions in Assessing Organizational Effectiveness*. Organizational Dynamics.
- Cameron, K. S., & Whetten, D. A. (2019). *Organizational Effectiveness: A Comparison of Multiple Models*. Academic Press.
- Denhardt, R. B. (2011). *Theories of Public Organization*. Wadsworth Cengage Learning.
- Departemen Dalam Negeri. (2017). *Pedoman Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan*. Jakarta: Kemendagri.
- Duncan, R. (2019). *Characteristics of Organizational Environments and Perceived Environmental Uncertainty*. Administrative Science Quarterly.
- Gibson, James L., Ivancevich, John M., & Donnelly, James H. (2021). *Organizations: Behavior, Structure, Processes*. New York: McGraw-Hill.
- Goldstein, H. (2019). *Problem-Oriented Policing*. New York: McGraw-Hill.

- Kaplan, R. S., & Norton, D. P. (2019). *The Balanced Scorecard*. Harvard Business Review.
- Moleong, L. J. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Parsons, T. (2019). *The Social System*. Glencoe: The Free Press.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2017 tentang Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Organisasi Kemasyarakatan
- Putra, R. E. (2024). *Kemitraan Polisi dan Komunitas dalam Pencegahan Konflik Sosial*. Jakarta: Rajawali Press
- Robbins, S. P. (2016). *Organizational Behavior*. New Jersey: Pearson.
- Rosenbaum, D. P. (2017). *Community Police Partnerships for Crime Prevention*. New York: Routledge.
- Setiawan, H. (2021). Efektivitas Kemitraan Polisi dan Masyarakat dalam Mencegah Konflik Sosial. *Jurnal Ilmu Kepolisian*, 15(2), 87–99.
- Siagian, S. P. (2023). *Teori dan Praktik Kepemimpinan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Skogan, W. G. (2016). *Community Policing: Can It Work?* Belmont: Wadsworth Publishing.
- Soekanto, S. (2018). *Sosiologi: Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Steers, R. M. (2019). *Efektivitas Organisasi*. Jakarta: Erlangga.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suryono, H. (2020). Peran Organisasi Masyarakat dalam Stabilitas Politik Lokal. *Jurnal Politik Lokal Indonesia*, 6(1), 45–60.
- Trojanowicz, R., & Bucqueroux, B. (2019). *Community Policing: How to Get Started*. Cincinnati: Anderson Publishing.
- van Meter, D. & van Horn, C. (2019). The Policy Implementation Process. *Administration & Society*, 6(4), 445–488.
- Wirawan. (2015). *Manajemen Konflik dan Resolusi Konflik*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Quinn, R. E., & Rohrbaugh, J. (2019). *A Spatial Model of Effectiveness Criteria: Towards a Competing Values Approach*. Management Science. <https://www.jstor.org/stable/2631061>.